FUNGSI, MAKSUD DAN NILAI NILAI KONSTITUSI

Nama : Srie Arini Wahyu Ningsih

Email:srearini145@gmail.com

No BP:2010003600133

Universitas Ekasakti - AAI Padang

Fakultas Hukum

A. PENDAHULUAN

Alhamdulliah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua terutama kepada penulis dan shalawat beriring salam disampaikan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah Ilmu Negara yang berjudul " Fungsi, Maksud dan Nilai Nilai konstitusi " sebagai salah satu syarat memenuhi mata kuliah di Universitas Ekasakti Padang.

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya

dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan - peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang.

1. Tujuan Makalah

- a) Untuk memenuhi salah satu nilai di mata kuliah.
- b) mengetahui salah satu Fungsi, Maksud, dan Nilai - nilai Konstitusi.
- c) Untuk mengembangkan wawasan mengenai konstitusi.

2. Rumusan Masalah

- a) Apa Fungsi dari konstitusi?
- b) Apa Maksud dari konstitusi?
- c) Apa saja Nilai - nilai konstitusi?

B. PEMBAHASAN

Konstitusi adalah seperangkat hukum dasar yang dijadikan pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

1. Fungsi Konstitusi

Bila dilihat dari fungsinya maka konstitusi dibagi menjadi dua yaitu:

Membagi kekuasaan dalam negara. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai Lembaga atau kumpulan asas

yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantara Lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain.

Dari uraian diatas konstitusi itu berfungsi serta mengatur pembagian kekuasaan dalam negara dalam dua bentuk :

a) Secara Vertikal

Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friderich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (teritorial division of power). Disamping itu konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan dalam negara. Macam-macam konstitusi tersebut adalah:

1) Konstitusi Unitaris.

Disebut demikian apabila pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat dengan kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol. Kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk yang luas (otonom).

2) Konstitusi Federalistis.

Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan sendiri dan bebas dalam bidangnya sendiri serta bebas dari pengawasan pihak pihak pemerintah negara Bagian dan dan begitu pula sebaliknya tidak lebih tinggi dan lebih rendah dengan yang lainnya. Beberapa ciri dari negara Federal:

- ★ Adanya supremasi daripada konstitusi dimana federal terwujud.

- ★ Adanya pembagian kekuasaan antara negara-negara federal dengan negara-negara bagian.
- ★ Adanya suatu Lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara negara federal dengan pemerintah negara-negara bagian.

3) Konstitusi Konfederalistis.

Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat tetapi kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Diragukan juga apakah negara konfederasi ini merupakan suatu negara atau dan juga diragukan apakah konfederasi ini mempunyai konstitusi.

b) Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian kekuasaan ini menunjukkan pula perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan Trias Politica. Dengan demikian fungsi konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang - wenang. Dengan demikian diharapkan dengan hak - hak warga negara akan lebih terlindungi.

2. Maksud dari Konstitusi.

Setiap undang-undang dasar mempunyai maksud. Antara lain pernah diutarakan maksud dan tujuan negara yang mempergunakan undang-undang dasar adalah sebagai berikut: “Dalam konstitusi yang modern ada tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negara”. Dalam konstitusi Indonesia

dapat dilihat pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam pembukaan disebutkan pada alinea ke-4 yaitu :

“Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam batang tubuh UUD 45 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia (pasal I ayat 1).

3. Nilai - nilai dari Konstitusi.

Karl Laewenstein memberikan tiga tingkatan nilai pada konstitusi yaitu:

a. Nilai yang bersifat Normatif.

Maksudnya ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati, tidak pernah terwujud. Jadi normatif jika konstitusi itu resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka bukan saja berlaku dalam arti hukum tetapi juga merupakan kenyataan dalam arti sepenuhnya.

b. Nilai yang bersifat Nominal.

Maksudnya ialah kalau kontitusi itu kenyataan tidak dilaksanakan dan hanya disebutkan namanya saja. Dengan kata lain konstitusi tersebut menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna.

c. Nilai yang bersifat Semantik.

Nilai konstitusi yang besifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tatasusunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Amandemen (bahasa inggris: amendtmendt) artinya perubahan. Perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.

2. SARAN

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan lebih berhati - hati untuk menjelaskan tentang sumber - sumber yang lebih banyak. Penulis merima kritikan dan saran untuk melengkapi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

\
Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.